

PERAN PASAR TRADISIONAL DALAM MENYERAP ANGKATAN KERJA PEREMPUAN

Siti Inayatul Faizah

Universitas Airlangga, Surabaya
e-mail: naya_viencha@yahoo.co.id

Abstract

Unbalancing between labour supply and ability of absorption capacity had been happening since long time ago. The construction decade era 1970's had signed a high unemployment problem. The absence of proletariat' side views could be one of the root of problem. The construction program also became the drift of city and man labor which caused significant difference between man and women labour. This difference then effected status movement of woman labour. Gradually, it was true that there was rising in Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) of woman. But if we comparee TPAK of woman with the whole woman population, it gave a low result. This low TPAK will have a negative effect on the acceleration of economic growth and development of construction process. According to SUSKERNAS, the increase of TPAK of woman before crisis in 1980s era was absorbed by industry sector. But, the peak of crisis in 1997 had caused massive decrease in the size of the sector of industry and TPAK of woman in this sector has gone down. As alternative, the supply of woman labour lean expectation and their life on informal sector traditional market. This sector became main alternative because it's flexible characteristic to accept any labor without seeing on gender, capital, skill and the access of labour information.

Keywords: *Unemployment, Woman Labour Force, Informal Sector, Traditional Market.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang berdampak pada perubahan besar pada kehidupan sosial-ekonomi. Di era 1970-an, perubahan tersebut ditandai dengan adanya ketimpangan pendapatan, terpuruknya masalah kemiskinan dan semakin merebaknya angka pengangguran. Permasalahan ketenagakerjaan ini juga mengalami perubahan yakni pada pola kerja kaum perempuan.¹ Masalah ketenagakerjaan perempuan dianggap cukup mendesak karena penduduk Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 209 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 105 juta (50,24%) perempuan dan 104 juta (49,78%) laki-laki. Separuh jumlah penduduk tersebut tinggal di kota dengan prosentase perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda dengan penduduk desa, yaitu; di kota 50,1% perempuan dan 49,9% laki-laki. Sedang di desa 49,7% perempuan dan 50,3% laki-laki. Namun

jumlah tersebut belum mewakili tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, dalam artian sebagian besar perempuan usia produktif lebih banyak terlibat dalam kegiatan non ekonomi dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang sifatnya bisa menghasilkan uang (Widiarni, 2005).

Selanjutnya Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2004 menunjukkan bahwa TPAK perempuan masih relatif rendah yaitu 49,2% dibandingkan dengan laki-laki 86,0%. Kontribusi penduduk upahan (*wage employment*) di sektor non pertanian juga masih rendah, yaitu 28,3% pada tahun 2002.² hal tersebut dimungkinkan karena keterbatasan ketenagakerjaan tambahan yang semakin sempit seperti di sektor pertanian untuk wilayah pedesaan (Oey,1985:8). Sedangkan di wilayah perkotaan lebih disebabkan karena semakin menyempitnya keberadaan sektor industri. Menurut data BPS awal maret dan oktober 2005 (Soedarso, 2006:2) diketahui bahwa kenaikan BBM sempat memukul keberadaan lapangan

¹ Setidaknya ada 3 faktor yang menandai perubahan tersebut, yakni: (1) pertumbuhan penduduk usia kerja yang terus menerus tinggi; (2) kepesatan pertumbuhan ekonomi, dan (3) faktor ke-2 telah mendorong berbagai perubahan sosial yang cepat termasuk permasalahan kemiskinan dan pengangguran (lihat Oey, 1985:17).

² Lihat Draft Ringkasan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia, per 25 Agustus 2005.

kerja. Meskipun pasca krisis BBM³ telah ada upaya *recovery*, namun sektor industri sebagai alatnya hanya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas. Kondisi demikian semakin diperparah setelah pasca kenaikan BBM terjadi krisis ekonomi global⁴ yang berakibat pada semakin meningkatnya angka pengangguran.

Pada tahun 1995 yang lalu BPS sebenarnya mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia waktu itu 11,1% di perkotaan dan bahkan 5,3% di wilayah pedesaan. Tetapi akibat imbas situasi krisis maka dapat dipastikan mengalami lonjakan yang cukup drastis. Dan akibat proses modernisasi yang tidak paralel dengan kesiapan basis sosial dan struktur ketenagakerjaan yang ada, maka sebagian besar penduduk pedesaan dan sebagaimana penduduk perkotaan tidak mendapat bagian dari pertumbuhan ekonomi. Bahkan tidak jarang di berbagai wilayah muncul pengangguran baru diantara kaum miskin yang mencolok (Soedarso, 2006;16).

Dalam hal ini Chris Manning dan Peter Van Dierman (2000) mencatat ada tiga perubahan penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia pasca krisis, yakni: *Pertama*, terjadi gelombang peningkatan arus balik urbanisasi dari desa ke kota (proses migrasi sirkular) sebagai akibat korban PHK. Proses ini terjadi karena desa asal tidak bisa memberikan harapan pekerjaan yang lebih baik daripada di kota. *Kedua*, ketika angkatan kerja sudah tidak tertampung dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan primer, maka terjadi peningkatan *feminisasi* dan *kasualisasi* (lepas) pekerja. Globalisasi, tekanan keadaan, dan meningkat-

nya kesadaran gender menyebabkan adanya perubahan pola ketegakerjaan. Bersamaan dengan badai krisis yang membuat banyak laki-laki kehilangan mata pencaharian utamanya. *Ketiga*, para pekerja cenderung beralih dari pekerjaan dengan penghasilan yang pasti ke pekerjaan sektor informal yang lebih labil dengan ketidakpastian penghasilan. Yang pasti, badai krisis telah melahirkan jutaan pengangguran baru.

Pernyataan di atas diperkuat berdasarkan data dan studi-studi yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa problem pengangguran terselamatkan oleh sektor informal yang bisa lebih menyerap tenaga kerja. Menurut data BPS 2008, jumlah pengangguran berkurang sebesar 584.000 dari jumlah awal sebesar 9,43 juta orang dibandingkan Agustus 2007 atau berkurang 1,12 juta orang dibanding jumlah pengangguran pada Pebruari 2007 yang mencapai 10,55 juta orang (*Kompas*, 16 Mei 2008). Angka penurunan pengangguran terbuka tersebut mencapai satu digit (9,8 %) per Pebruari 2007 dinilai cukup konsisten. Meskipun bila ditinjau dari pendapatan per kapita-nya tetap saja angka pengangguran sebesar 9,75 % tergolong relatif tinggi. Apalagi sistem jaminan sosial yang ada masih jauh dari memadai. Namun keberadaan sektor informal (termasuk didalamnya bergelut sektor pertanian dan non pertanian) cukup diminati dan merupakan pilihan terdekat untuk mendapatkan masukan penghasilan, setidaknya orang tidak jatuh dalam kemiskinan absolut (<http://www.eksis.sektorinformal.com/andi.ferdi/an/01/08/2007-11;7>).

Persoalan mengenai krusialnya angka pengangguran dan menyempitnya kesempatan kerja di sektor informal yang tersedia, pihak pertama yang terlempar adalah tenaga kerja perempuan. Meskipun data Sakernas menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan per-tahunnya, namun perbandingan angka menunjukkan bahwa TPAK perempuan di setiap tahunnya mengalami pertambahan. Kenaikan TPAK perempuan ini sebagian disebabkan oleh bertambahnya kemiskinan dan merebaknya angka pengangguran di sektor formal (Sutinah, 1996;52). Seperti sudah dikaji banyak ahli, di lingkungan keluarga yang semakin dihimpit kemiskinan dan semakin beratnya tekanan kehidupan, menyebabkan sebagian dari anggota keluarga

³ Indonesia telah mengalami beberapa kali resesi diantaranya resesi di era 1974-1975 yang disebabkan karena kasus yang sama. Resesi di era ini meskipun cukup singkat namun dikatakan cukup tajam karena kenaikan harga minyak mencapai empat kali lipat. Kemudian di era 1980-an terjadi resesi yang kesemuanya itu berbarengan dengan adanya situasi 'uang ketat' di pasar uang dunia. Kondisi tersebut merupakan 'shock' pada perekonomian Indonesia sebagai menimbulkan adanya proses "*adjustmen problem*" atau problem penyesuaian yang berakibat pada adanya kebijakan restrukturisasi pola produksi, perdagangan konsumsi (Lihat Boediono, 1983;16-24).

⁴ Krisis ekonomi global merupakan kelanjutan dari krisis yang terjadi di era 2005 yang berakibat pada terpukulnya dunia kerja yang ditandai dengan adanya gelombang PHK besar-besaran dalam dunia industri Indonesia (Soedarso, 2006;12-13).

lain ikut berperan secara produktif sekalipun dengan imbalan yang sangat rendah. Fakta seperti menyebabkan anggota keluarga kategori usia tidak produktif sekalipun (termasuk anak-anak perempuan dan ibu rumah tangga) beralih peran dari kegiatan domestik ke kegiatan produktif yang bisa menghasilkan uang baik di dalam rumah atau di luar rumah.

Secara kuantitas, tenaga kerja perempuan sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan, namun potensi tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga dimungkinkan hal tersebut berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan proses pembangunan (Yustika, 2003). Keterbatasan penyerapan tenaga kerja di sektor formal tersebut menyebabkan sebagian besar perempuan terjun ke sektor informal terutama pada sub sektor jasa dan pelayanan umum⁵. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian di Jawa Timur Wingjosoebroto, ed. (1996) bahwa sektor informal khususnya pasar tradisional memiliki daya involutif besar dalam menyerap kelebihan tenaga kerja perempuan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Suyanto, ed. (2008) dengan hasil penelitiannya yang dilakukan di Surabaya menyebutkan bahwa sebesar 46,4% sektor informal kota, 20,2% sektor perdagangan tradisional dan sebagian mengembangkan usaha kecil-kecilan sebanyak 2,8% telah menjadi katup penyelamat pertama dalam penyerapan tenaga kerja perempuan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Faizah (2009) dengan perempuan bakul dan pasar tradisionalnya di Keputran, Surabaya memberikan hasil bahwa pasar tradisional bukan hanya memberi peluang kerja bagi penduduk (khususnya perempuan) usia produktif. Pada kenyataannya sektor ini telah menjadi gantungan hidup bagi perempuan-perempuan kategori bukan usia produktif. Walaupun penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya tidak terlampaui besar, bahkan mungkin pas-pasan namun bagi mereka

yang terpenting adalah memiliki tempat untuk menggantungkan hidup, dalam arti ada penghasilan rutin yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka⁶.

Keberadaan pasar tradisional yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai dewa penyelamat, sayangnya tidak diimbangi dengan paket kebijakan yang memihak pada keberadaannya. Fenomena ini sangat memprihatinkan seperti yang terungkap dalam studi Wingjosoebroto (1996) menyimpulkan bahwa keunggulan pasar tradisional dengan daya involutif untuk tenaga kerja perempuan tidak diimbangi dengan keperpihakan pemerintah melalui program pembangunannya yang kurang berpihak pada masyarakat kelas bawah. Dan dengan menjamurnya pusat perbelanjaan modern ditengarai akan mengancam keberadaan pasar tradisional dan sangat memungkinkan terjadi marginalisasi tenaga kerja perempuan. Sehingga dilema tentang ketegakerjaan perempuan (khususnya) dan laki-laki umumnya masih menjadi masalah yang krusial dan membutuhkan satu solusi kebijakan pembangunan yang lentur terhadap penyerapan tenaga kerja.

PEMBAHASAN

Pengangguran (Definisi dan Akar Masalah)

Banyaknya perusahaan yang terpaksa melakukan PHK semenjak pasca krisis BBM 2005, menyisakan suatu permasalahan yang krusial dalam dunia kerja. Dari total jumlah penduduk, hanya sebagian kecil yang bekerja dan sebagian lainnya tidak bekerja. Yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yaitu mereka yang berusia 15 thn ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan, sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau disebut pengangguran (Tjiptoherijanto, 1997). Pengangguran tidak berkaitan dengan mereka yang berminat untuk tidak bekerja seperti siswa atau mahasiswa (sekalipun mereka berusaha mencari atau *nyambi* kerja), termasuk

⁵ Perubahan sektoral ketenagakerjaan setidaknya bisa diklasifikasikan dalam 3 sektor, yakni: pertanian, industri dan jasa. Menyempitnya lahan pertanian menyebabkan penduduk setempat melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari sumber penghidupan. Sedangkan sektor industri ada berbagai kebijakan dalam masalah dan kriteria tertentu mengenai pemberdayaan tenaga kerja dan sektor informal jasa sebagai salah satu alternatif utama labuhan kerja mereka (Lihat Alisjahbana, 2005).

⁶ Apa yang dilakukan oleh perempuan pekerja tersebut oleh Scott (1968), Dieter-Evers (1993) dan Ellis (1998) diupayakan sebagai upaya maksimalisasi ekonomi rumah tangga dengan pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga yang berlebih untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok subsistensi mereka. Dalam perspektif subsistensi ini prinsip pokok yang terpenting adalah memperoleh penghasilan yang sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (lihat Faizah, 2009; 119-132).

ibu rumah tangga yang fokus pada urusan rumah tangga atau penduduk usia kerja yang karena kondisi fisik, mereka tidak dapat bekerja (Yusdianto, dalam Soedarso 2006;12).

Secara rinci Yusdianto (2006) menyebutkan terdapat empat tipe pengangguran. Pertama, pengangguran friksional, yakni pengangguran yang muncul karena adanya waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan kualifikasi pekerja dengan pekerjaan yang tersedia. Kedua, pengangguran struktural adalah pencari kerja yang tidak memenuhi kriteria persyaratan yang diminta penyedia kerja. Ketiga, pengangguran musiman adalah pengangguran karena adanya perubahan penawaran dan permintaan tenaga kerja musiman. Keempat, pengangguran *siklikal* adalah fluktuasi pengangguran yang disebutkan karena siklus bisnis.

Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Banyak faktor yang saling mempengaruhi dan berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk difahami. Seperti faktor demografi sangat berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi angkatan kerja. Sejak terjadi fenomena *baby boom* atau ledakan jumlah penduduk dalam struktur demografi menduduki jumlah besar, menjadikan permasalahan lapangan kerja menjadi semakin rumit untuk dipecahkan. Merebaknya pengangguran di berbagai wilayah sebagai akibat tidak keseimbangan penawaran dan permintaan di sektor industri yang acapkali menimbulkan *excess supply of labor* yang termanifestasi dalam pengangguran friksional⁷ (Soedarso, 2006;15).

⁷ Pengangguran friksional menyebabkan timbulnya jenis pengangguran putus asa (*discourage unemployment*). Hal itu disebabkan karena pada saat pengangguran yang terjadi akibat pindahannya seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam tenggang waktu yang agak lama sehingga dikatakan sebagai pengangguran. Permasalahan pelik muncul disebabkan karena suksesi pekerjaan tersebut disebabkan sepihak, sehingga pekerja berada pada posisi subordinasi. Akibatnya ketika pencari kerja itu beranggapan bahwa tidak ada lagi lapangan kerja yang cocok dan atau mau menampung dirinya, hal ini akan berdampak pada keputusan dan jera untuk

Beberapa masalah lain yang juga berpengaruh terhadap ketenagakerjaan adalah masih rendahnya arus masuk modal asing, perilaku proteksionis sejumlah negara-negara maju dalam menerima ekspor komoditi negara-negara berkembang, iklim investasi, pasar global, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha, serta tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Disamping masalah-masalah tersebut di atas, faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan (Tjiptoherijanto,1997). Berbagai faktor tersebut saling terkait sehingga permasalahan tenaga kerja ini difahami sebagai masalah multidimensi dan membutuhkan pemecahan masalah yang multidimensi juga. Seperti pada permasalahan kemiskinan, faktor utama inilah yang menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini sangat berkaitan dengan kadar keterisolasian mereka terhadap dunia kerja. Mereka umumnya tidak memiliki koneksi atau *networking* untuk memperoleh pekerjaan dan pengetahuan-pengetahuan yang memadai (Suyanto, 2008;71)⁸.

Dalam pernyataan lain, Nanga (2000) mengindikasikan beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat antara lain disebabkan penyediaan lahan kerja di sektor formal yang lebih banyak menggunakan sistem padat modal, memberikan pengaruh subtisusi pada pengu-

mencari pekerjaan. Karenanya dikategorikan sebagai pengangguran putus asa (Lihat Soedarso,2006;19).

⁸ Permasalahan pengangguran yang berkaitan dengan faktor kemiskinan ini memang cukup krusial, ibaratkan suatu siklus, keterkaitan permasalahan ini seperti lingkaran setan yang sulit untuk memutuskan jaring lingkaran ini. Bila dirunut, kemiskinan disebabkan karena tidak meratanya distribusi pendapatan antara penduduk satu dengan lainnya, yang berdampak pada terbaikannya masalah kesejahteraan sosial, kesehatan dan sulit mengakses pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik. Perolehan pendapatan berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja yang bisa memberikan jaminan penghasilan yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup dan sosialnya dalam posisi sejahtera. Sedangkan lapangan pekerjaan yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan mensyaratkan beberapa keahlian tertentu dengan dasar pendidikan yang tinggi. Dilain pihak masyarakat miskin tidak mempunyai apa disyaratkan dunia kerja agar bisa mengamankan diri dalam perolehan kerja yang bisa menjamin kesejahteraan diri dan keluarganya (Diolah dari berbagai sumber).

rangan penggunaan tenaga kerja manusia. Sebagai penggantinya, pengaruh komplementer dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dengan alasan utama peningkatan produktivitas akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja dan hal ini memberikan implikasi pada semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Dalam artian dunia tenaga kerja mengalami penyempitan pada sektor formal sebagai salah satu faktor pemicu semakin bertambahnya jumlah pengangguran.

Faktor lain berdampak dalam permasalahan pengangguran ini berkaitan dengan perumusan kebijakan pembangunan yang '*bias kota dan bias gender*' *Suyanto,2008;12) sehingga menimbulkan *disparitas* antar wilayah yang menyebabkan makin berkurangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan dan menimbulkan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) dan sebagai konsekwensinya terjadi penumpukan (timbulnya) pengangguran baru di wilayah perkotaan. Disisi lain, proporsi penduduk yang bekerja atau TPAK, merefleksikan jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya. Seperti dikatakan, pembangunan yang '*bias gender*' (menurut Sinha, 1985) akan merubah partisipasi perempuan dan akan mengikuti pola yang membentuk "huruf U". Pada tahap pertama dalam pembangunan, lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan tradisional akan berkurang lebih cepat daripada peningkatan lapangan pekerjaan di sektor modern. Diperkirakan hal ini akan mengurangi kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan perempuan. Pada waktu bersamaan, proses pembangunan juga meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang sebelumnya memaksa perempuan bekerja. Kedua hal ini menyebabkan perempuan keluar dari angkatan kerja dan menyebabkan TPAK perempuan menurun (Suyanto, 2008; 21).

Sebuah Kekeliruan di Masa Lalu

Laju pertumbuhan pembangunan yang tidak diimbangi dengan proses penyesuaian terhadap kehidupan sosial-kemasyarakatan akan selalu menimbulkan eksek negatif yang saling bertautan antara dimensi kehidupan satu dengan dimensi kehidupan lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui derivasi paradigma pembangunan konvensional yang sangat populer

yaitu Rostow (1997, dalam Sudarso, 2006;23) bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan sosial-budaya dan politik. Pada dasarnya pembangunan ekonomi berarti adanya transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Adanya suatu transformasi multi-dimensional yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan berbeda namun mempunyai urgensi yang sama disampaikan oleh Lewis (1959) bahwa paradigma pembangunan dipandang sebagai persoalan bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kondisi penawaran angkatan kerja yang tidak terbatas.

Meskipun pembangunan menunjukkan suatu perkembangan yang pesat an peningkatan produktivitas yang tinggi, namun paradigma pembangunan (Nasikun, 1984;8) secara aplikasi telah melestarikan problem masa lalu yang belum terselesaikan diantaranya mengenai masalah pengangguran. Seperti pembangunan suatu kawasan tertentu sebagai proyek percontohan kawasan modern, pembangunan akan difokuskan pada pusat kawasan untuk mendirikan enclave industri modern yang menguntungkan sekelompok minoritas, elit perkotaan yang mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ilustrasi tersebut sebagaimana analisa Kian-We (1977;7-8) dikatakan sebagai strategi pembangunan yang diterapkan lebih banyak menekankan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang mementingkan pemecahan efektif mengenai berbagai permasalahan sebagai akibat dari pembangunan tersebut seperti permasalahan tentang ketenaga-kerjaan, pemerataan pendapatan dan kemiskinan. Oleh Kian-We dikatakan sebagai strategi pembangunan *diskriminatoris* terhadap golongan penduduk yang berpendapatan rendah⁹.

Dalam tesis lain Dieter-Evers (1986)

⁹ Strategi pembangunan *diskriminatoris* ini pada umumnya disebabkan karena kurang diperhitungkannya secara matang antara biaya yang diderita dan keuntungan yang diperoleh suatu golongan penduduk sebagai akibat proyek pembangunan tertentu. Dalam arti lain efek negatif dan positif (*incidence of cost and benefits*) dari suatu kebijakan pembangunan tertentu sering tidak diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan, sehingga seringkali suatu kebijakan tertentu seringkali merugikan golongan masyarakat bawah (Lihat Kian-We, 1977;3-9).

dalam sosiologi perkotaannya menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah tertentu menyebabkan adanya penetrasi penduduk pusat kota ke daerah pinggiran atau apa yang disebut Dieter-Evers dengan "Efek Lompat Katak". Invansi penduduk kelas menengah ke wilayah agraris di daerah hinterland yang masih subur secara ekologis akan menimbulkan kerugian yang sangat parah. Sebagai sebuah catatan, di Surabaya dari tahun 1980-1983 berdasarkan catatan monografi (Suyanto, 2008;26) perluasan areal untuk kegunaan pemukiman dan industri telah menggusur lahan pertanian seluas 10.378 hektar menjadi 8.608 hektar dan tambak seluas 102 hektar menjadi 80 hektar. Sebagai akibat alih fungsi lahan tersebut berdampak yang cukup signifikan pada pengurangan dan menyempitnya lahan pekerjaan bagi penduduk sekitar. Sebagai akibat lanjutan, bermunculanlah pengangguran-pengangguran baru dalam jumlah tidak sedikit. Fenomena tersebut menyiratkan bahwa kebijakan pembangunan yang dikembangkan (Suyanto,2006;7) adalah paket kebijakan dan program pembangunan yang bersifat *meritokratis* dan *a-historis* yang seringkali kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat sekitar¹⁰.

Penyempitan peluang kerja di sektor agraria juga merupakan warisan sejarah yang ditandai dengan adanya reformasi agraria dengan dua program utamanya yakni involusi pertanian dan revolusi hijau (Sajogjo, 1977;7). Mekanisasi di sektor pertanian dengan mengalihkan sistem produksi dan pengolahan dari alat manual yang lebih banyak memanfaatkan sumber tenaga kerja manusia beralih pada sistem dan peralatan modern yang operasionalnya cukup dilakukan oleh segelintir orang. Sistem mekanisasi ini berakibat pada jumlah penurunan yang cukup tajam bagi pekerja perempuan di bidang pertanian (Oey, 1985;27).

Selain faktor tersebut, budaya *patriarkhi* telah membawa perempuan pada posisi yang sangat lemah dan rentan dalam dunia kerja. Budaya ini pun telah membagi peran

laki laki dan perempuan yang berkaitan dengan siklus ekonomi termasuk persoalan dinamika permintaan dan penawaran kerja (Wiludjeng, 2005;155-158). Konsekwensi lebih lanjut dari budaya *patriarkhi* ini adalah tenaga kerja perempuan dilihat sebagai hal sekunder dan bagian 'alami' dari peran biologisnya¹¹, sehingga perempuan cenderung tetap berada dalam sektor domestik dan subsisten. Hal ini serupa dengan yang dikatakan Barbara Rogers (Mosse, 1993;31) sebagai domestikasi perempuan (*domestication of woman*), yakni jenis pekerjaan yang dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Perempuan ditawarkan proyek pembangunan yang berasal dari dunianya sendiri yang in-produktif, seperti menyulam, menjahit, memasak yang intinya suatu pekerjaan yang hanya cocok bagi perempuan.

Ironisnya lagi, pembangunan nasional sebagaimana dinyatakan Mosse (1993;26) pada umumnya pembangunan yang 'bias laki-laki'. Karena perempuan adalah anggota rumah tangga yang didominasi oleh laki-laki, sehingga dalam perspektif ini perempuan seringkali luput dari pertimbangan dan terlupakan dan sangat kecil kemungkinan untuk memiliki akses terhadap sumber pembangunan, misalnya terhadap perolehan modal kerja atau perhatian perhatian pekerja secara luas. Kaum feminis (Sandy, 1981;76) menyikapi fenomena tersebut sebagai sebuah paradigma ketimpangan pembangunan yang bersumber dari ketidak-adilan gender (*gender inequalities*) yang menimbulkan permasalahan berkelanjutan diantaranya rendahnya sumber daya kaum perempuan yang menyebabkan ketidakmampuan perempuan bersaing dengan laki-laki dalam dunia kerja dan pembangunan. Selain tersebut permasalahan yang berkelanjutan adalah pemiskinan kaum perempuan karena mereka tidak produktif. Sehingga dari berbagai rangkaian permasalahan ini perlu diciptakan proyek peningkatan pendapatan yang merangsang terciptanya lapangan pekerjaan yang menekankan kepeduliannya pada kaum perempuan. Selain itu juga diharapkan penentu kebijakan tidak terperosok lagi pada

¹⁰ Program pembangunan seringkali terjebak pada program karitatif yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi dengan pertimbangan logika produksi dan mengejar omzet produksi dengan menggunakan teknik padat modal dan kurang berorientasi pada pada program pemberdayaan tenaga kerja manusia (Lihat Soedarso, 2006;43).

¹¹ Pembagian peran publik (laki-laki) dan domestik (perempuan) mengakibatkan adanya diskriminasi perempuan dalam dunia kerja. Perempuan kurang leluasa menggunakan hak asasinya untuk memilih menjadi penanggung jawab keluarga dikala suami menganggur, atau suami bekerja tapi tidak mendapatkan penghasilan menentu (Lihat Wiludjeng, 2005;1-5).

kekeliruan yang sama yang membuat semakin terpuruknya dunia kerja pada umumnya.

Kesempatan Kerja Kaum Perempuan

Perempuan dalam perspektif ekonomi bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sangat besar. Kehadiran perempuan dalam kehidupan rumah tangga bukan hanya sebagai pelengkap sumber reproduksi saja, akan tetapi memberi kontribusi yang cukup besar dalam kehidupan rumah tangga (Sugiharti, 1996;47). Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan perempuan selalu ter subordinasi sebagai kaum kelas dua. Hal tersebut bisa dijelaskan karena budaya patriarki yang mengkristal dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai imbasnya budaya tersebut membawa perempuan pada posisi lemah dan rentan dalam dunia kerja. Ini seperti yang dikemukakan Ari (dalam Wiludjeng, 2005;vii) bahwa perempuan telah terkondisikan sebagai warga kelas dua¹² sejak dari rumah dan ketika di ranah publik perempuan di anggap tidak mempunyai peran. Kondisi demikian menjadikan adanya pembedaan peran laki-laki dan perempuan dalam wilayah publik dan domestik. Oleh karena itu terdapat suatu pandangan tentang perempuan yang bekerja di luar rumah selalu dianggap sebagai penghasil tambahan dalam keluarga meskipun penghasilan lebih besar dari laki-laki (suami).

Menurut analisa ILO (Organisasi Buruh Internasional) dalam Konfrensi Internasional di Nairobi¹³, Juli 1985 di Afrika (Prisma 1985)

menyatakan tentang anggaran kerja perempuan sebanyak 35% seharusnya menjadi hak perempuan dalam bentuk upah, dengan pedoman pembayaran yang sama. Namun menurut ILO tidak ada kerja yang sama. Sebab perempuan cenderung melakukan pekerjaan yang tidak sama dengan laki-laki, dan kembali ke peranan perempuan dalam wilayah domestik yang menjadi inti permasalahan. Dalam hal ini, perempuan menjalankan pekerjaan rumah tangga dalam tekanan beban kerja lebih dan perempuan memilih pekerjaan tersebut. Selanjutnya dari hasil konferensi di Nairobi, dalam kajian lain (Pia,1985;63) menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, menyetrika, membersihkan rumah, dan mengurus anak adalah merupakan pekerjaan yang bernilai ekonomi dan bila dihitung dan di beri upah, maka penghasilan seorang perempuan akan lebih besar.

Mengenai keterlibatan perempuan dalam kegiatan produktif ekonomi, hasil penelitian Mubyarto (1984) menyimpulkan bahwa faktor kemiskinan yang ditandai dengan adanya pendapatan yang sangat rendah, kurangnya ketrampilan serta rendahnya standart hidup, menyebabkan para ibu turut bekerja dalam sektor informal jasa ataupun perdagangan guna menopang penghasilan suami atau agar dapat bertahan hidup layak. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Asyiek (1994) bahwa perempuan bekerja bukanlah sebagai penambah penghasilan keluarga semata. Tetapi bisa dikatakan untuk mengentaskan kemiskinan keluarga. Sedangkan Suhatmini (1994) menguatkan pernyataan tersebut dalam penelitiannya yang menyebutkan tentang tanggung jawab beratnya beban rumah tangga sangat ditentukan oleh pekerjaan yang menguntungkan (produktif). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Yotolembah (2002) memperlihatkan dalam pemenuhan jenjang kebutuhan keluarga walaupun tidak berurutan akan pemenuhan jenjang kebutuhannya, namun sebagian besar dari kebutuhan keluarga telah dipenuhi oleh istri. Karena perempuan sangat potensial melakukan kegiatan produktif yang

¹² Subordinasi kaum perempuan yang dikontrol kaum laki-laki dalam budaya Jawa memunculkan ideologi *familialism* (meminjam istilah Baret dalam Elmhrist,1990) yang dilestarikan melalui proses sejarah yang kompleks. Ideologi tersebut menempatkan perempuan di wilayah domestik dan ibu rumah tangga, sehingga kajian tentang perempuan dalam perspektif dunia kerja hampir tidak bisa dilepaskan dengan tema sentral perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Karnanya ideologi *familialism* dalam kehidupan sosial-masyarakat telah termanipulasi secara politis untuk mengontrol akses perempuan terhadap berbagai sumber daya dan mempasifkan perempuan (Lihat Kusutjiarti, 2003;147-149).

¹³ Nairobi, sebuah Ibukota Kenya, Afrika, sebagai tempat 'dasawarsa PBB' yakni sebuah konfrensi perempuan sedunia. Sebanyak 140 negara dengan 16.000 perempuan sedunia berkumpul untuk mengadakan penilaian dalam peninjauan selama dasa warsa perempuan PBB. Karena pada 1975 di deklarasikan sebagai "Tahun Perempuan Internasional". Penilaian tersebut berkisar pada apa yang sudah di capai oleh komitmen inter-

nasional tersebut untuk memperbaiki status perempuan meliputi gerakan-gerakan feminis, kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan, pekerjaan, politik sampai pada peran perempuan dalam pembangunan negara. (Prisma, 1985)

menghasilkan income dan dapat membantu ekonomi keluarga, dalam aspek lebih luas ekonomi nasional. Dengan potensi tersebut perempuan potensial berperan aktif dalam *recovery economy* dalam upaya penanggulangan pengangguran (Hendarso, 2000).

Berkaitan dengan dunia pekerjaan, Rahma (1996) menyatakan terdapat dua tolok ukur yang memperlihatkan fungsi dan pentingnya seorang perempuan, yakni: (1) kesediaan seorang perempuan untuk mau melakukan pekerjaan domestik yang dengan kesediaannya itu telah memberikan kelonggaran pada anggota keluarga yang lain utamanya laki-laki (suami) untuk melakukan kegiatan produktif di luar rumah, dan (2) keterlibatan perempuan dalam dunia kerja diperlihatkan dengan semakin meningkatnya angka TPAK perempuan yang bisa dilihat dari data BPS¹⁴. Mengenai kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ini, Sutinah (1996) menyebutkan salah satu faktor penyebabnya adalah semakin meningkatnya angka kemiskinan¹⁵ dan bertambah besarnya jumlah pengangguran. Semakin mereka dihipit tekanan keadaan yang semakin memberatkan, akan merangsang bahkan memaksa bagian dari anggota keluarga termasuk perempuan (istri) untuk melakukan kegiatan produktif di luar rumah yang lebih memberikan penghasilan. Senada dengan Oey (1985) TPAK dipengaruhi dengan meningkat-

nya angka pengangguran yang sesungguhnya merupakan gambaran keadaan keluarga miskin, termasuk perempuan tidak dapat hidup dalam pengangguran yang mengharuskan mereka mencari kerja produktif meskipun dengan imbalan yang sangat rendah.

Banyaknya perempuan yang memanfaatkan tenaga kerjanya dalam kegiatan produktif, dalam penelitian yang dilakukan Faizah (2009) terdapat indikasi bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan merupakan suatu usaha dalam kategori subsisten. Artinya usaha yang hasilnya lebih banyak habis untuk konsumsi sehari-hari, dan usaha yang dilakukan perempuan ini merupakan pilihan terakhir diantara terbatasnya pilihan yang ada. Sebagai akibatnya perempuan harus menyandarkan kehidupan pada sumber marginal pada *periferi* ekonomi pasar tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, tidak jarang para perempuan melakukan usaha produktif lebih dari satu bila dirasa usaha produktif yang dilakukannya kurang mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Hal tersebut bisa ditunjukkan dari kegiatan perempuan yang *nyambi* pekerjaan lebih dari satu, seperti bekerja sebagai penatu pakaian merangkap sebagai pengasuh anak tetangga, sedangkan malam harinya meneruskan pekerjaan sebagai *bakul* gorengan (membuka warung kecil di depan rumah) dengan modal seadanya (Faizah, 2009). Sehingga hasil produksinya pun minim, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti yang dikatakan Suyanto (2008) yang terpenting bagi mereka adalah bisa mendapatkan tempat atau pekerjaan untuk bergantung, sekecil apapun manfaatnya, karena ditengah kondisi ekonomi saat ini, sangat susah bagi mereka untuk mengembangkan usaha yang tentunya beresiko tinggi ditambah lagi dengan persoalan modal usaha baru yang sudah tentu sangat sulit bagi keluarga miskin untuk mendapatkannya.

Secara ekonomi, perempuan rentan dan tidak memiliki ketrampilan cukup menyebabkan mereka tidak bisa terserap dalam sektor modern yang serba padat modal dan efisiensi. Dalam data biro pusat statistik (Suyanto,2008) menunjukkan bahwa pada tahun 1990 menunjukkan 93,3% tenaga kerja perempuan hanya berpendidikan SMP ke bawah, kalau ada pun tenaga kerja perempuan miskin yang berpendidikan rendah bisa terserap dalam sektor

¹⁴ Meningkatnya TPAK ini oleh White (1990) dilihat sebagai dua gejala yang saling bertentangan. Pertama, dipandang sebagai pertanda peralihan kedudukan perempuan dari status pekerja keluarga yang tidak dibayar dalam wilayah domestik menjadi pekerja upahan yang merupakan status sebagai penerima upah mandiri meskipun upah dan kondisi kerja masih minimal. Kedua, masuknya perempuan dalam atau menjadi pekerja upahan, dipandang sebagai pertanda ekspansi sistem ekonomi kapitalis yang memanfaatkan potensi tenaga kerja perempuan yang melimpah dan murah untuk diakumulasi dengan modal. Sebagai akibatnya kondisi kerja perempuan sangat memprihatinkan dengan upah rendah dan kurangnya perlindungan kerja yang memadai (Susanti,2005).

¹⁵ Yang disebut keluarga miskin bukan hanya dilihat dari tampilan kesederhanaan tempat tinggal mereka, tapi juga ditunjukkan ciri-ciri social-kulturalnya. Secara umum profil sosial yang merupakan karakteristik penduduk miskin di kantong-kantong kemiskinan kota adalah kebanyakan mereka yang kurang pendidikan, bekerja di sektor informal kota dengan penghasilan dan upah rendah, tidak berkeahlian dan sulit untuk menerobos serta melakukan mobilisasi vertikal karena sebab-sebab yang bersifat struktural (Suyanto,2008)

industri, umumnya terbatas pada tenaga kerja kasar dan buruh yang digaji sangat rendah. Kondisi seperti ini disebutkan dalam penelitian Mather (dalam Sutinah, 1996) sebagai upaya dan strategi pengusaha untuk mencari tenaga kerja perempuan yang berumur antara 13-20 tahun dengan tujuan pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya tunjangan sosial karena tidak ada tanggungan keluarga. Sebagaimana dinyatakan Oey (1985:22) bahwa terjadi pola pergeseran tenaga kerja perempuan ditunjukkan dengan adanya peningkatan buruh tenaga kerja perempuan yang terserap di sektor industri adalah tenaga kerja perempuan berusia 13-20 tahun, sedangkan usia 20-24 tahun yang terserap hanya 10%, dan untuk tenaga kerja perempuan yang berusia 25 tahun keatas cenderung semakin menurun¹⁶.

Kenyataan inilah yang menyebabkan bergesernya pola kerja perempuan yang berusia 25 tahun keatas (dan perempuan bersuami) dari sektor formal industri ke sektor informal jasa dan perdagangan¹⁷ sebagai tumpuan harapan mereka. Dalam berbagai penelitian disebutkan bahwa perempuan yang berperan dalam dunia perdagangan informal semakin banyak dan ragam perdagangan perempuan (umumnya pedagang kecil/bakul) akan berdampak juga pada system sosial yang ada dan menuntut

untuk mengadakan penyesuaian. Hal ini seperti yang dinyatakan Wingjosoebroto (1996) bahwa dunia perdagangan telah menciptakan lapangan pekerjaan untuk penduduk tersisih dari sektor pertanian (atau industri) melalui dua cara yakni: (1) penciptaan tenaga kerja secara langsung yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja baik berupa bakul-bakul kecil, pengecer, dan grosir dalam jumlah besar, dan (2) penciptaan kesempatan kerja secara tidak langsung, yaitu melalui perluasan pasar yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan dan untuk memperlancar penyaluran arus barang dan pengadaan bahan baku untuk diolah maupun dijual langsung.

Karakteristik pasar yang terbuka untuk siapa saja yang ingin mencari penghidupan ini, memudahkan bagi perempuan-perempuan yang tersisih dari kegiatan produktif informal untuk terjun dalam dunia pasar. Dengan modal seadanya (modal nekat atau niat saja) tanpa dibarengi dengan keahlian tertentu, sangat memungkinkan bagi perempuan-perempuan tersebut untuk bisa menggantungkan kehidupannya dalam kegiatan pasar. Berkaitan dengan pemilihan pekerjaan, Peluso (1984, dalam Hendarso 2000) menyatakan bahwa pilihan pekerjaan perempuan dibatasi oleh siklus hidup yang dijalani karena tuntutan keluarga akan waktu perempuan untuk mengatur pembagian kerja antara tugas rumah tangga dan tugas mencari nafkah.

Sektor Informal (Konsep dan Urgensinya)

Sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart, seorang Antropolog pada 1973 dengan penelitiannya di kota ACCRA dan NIMA (Ghana). Kemudian hasil penelitian ini dikembangkan oleh ILO (International Labor of Organisation)/UNDP melalui hasil penelitiannya di Kenya. Selanjutnya, secara intensif Sethuraman (1981) memperluas konsep ini melalui beberapa penelitiannya di berbagai negara (Hermanto dalam Firdausy, 1995:8-9). Hasil penelitian Sethuraman ini menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam sektor informal ini pada umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (*prime age*), berpendidikan rendah, upah minimum dengan modal rendah serta sektor ini memungkinkan untuk melakukan mobilitas vertikal (Sethuraman, 1981; 188). Mazumdar, ed. dalam Rachbini dan Hamid (1994:2) mengembangkan

¹⁶ Buruh sektor formal di Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Sedangkan sektor pertanian dan industri memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada pola hubungan kerja. Pola hubungan kerja di sektor industri, pola hubungannya sangat lugas (*businesslike*). Sedangkan pola hubungan di sektor agraris bersifat kekeluargaan yang tidak mempersyaratkan secara lugas mengenai masalah upah atau jaminan-jaminan lainnya. Pengaruh-pengaruh dari karakteristik ini terbawa kedalam dunia kerja manufaktur, akibatnya sangat kurang menguntungkan pada posisi buruh termasuk buruh perempuan, tidak berani melakukan penawaran mengenai masalah upah, jaminan sosial, kesejahteraan sosial bahkan cenderung tereksplotasi secara sepihak oleh pihak majikan (Lihat Wiludjeng, ed. 2005).

¹⁷ Alternatif pekerjaan di sektor informal saat ini yang menjadi tumpuan adalah pada usaha jasa dan perdagangan. Berdasarkan data, sektor informal pertanian yang dulunya mampu mengkaryakan perempuan, telah mengalami penurunan semenjak adanya revolusi hijau yang mengalihkan pemanfaatan tenaga manusia pada alat modern. Selain itu alih fungsi sawah (di Jawa) antara tahun 1981-1998 berkurang mencapai 1.000.000 hektar, sementara percontakan sawah baru hanya 518.000 (52 %) hektar. Itu berarti bahwa selama kurun 17 tahun, sawah di Jawa berkurang seluas 483.000 hektar (48 %) (Khudori, 2003).

konsep sektor informal dan informal berdasarkan adanya analisis dikotomi pasar tenaga kerja yang terfragmentasi. Dalam kerangka analisis ini, sektor formal adalah sektor yang mendapat proteksi, sedang sektor informal tidak mendapat proteksi. Dikotomi seperti ini mampu menjelaskan kondisi struktural tenaga kerja tersebut.

Sementara itu House (1984;298) dengan analisisnya terhadap sektor informal di Nairobi menyatakan bahwa sektor informal dapat dikategorikan dalam dua sub sektor, yaitu sektor intermediate serta komunitas miskin. Dari sinilah House memberikan rekomendasinya untuk memfokuskan sektor informal pada telaahan yang lebih jauh atas sub sektor intermediate karena pentingnya sub sektor ini bagi reservoir dinamika kewirausahaan, pertumbuhan pendapatan ekonomi dan peluang kerja. Dieter-Evers (1991) menyebut sektor informal sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (*underground economy*) yang didefinisikan sebagai kegiatan apa saja mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, perempuan bekerja yang tidak dibayar sampai dengan penggelapan pajak, serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktik ekonomi legal.

Melalui pengertian dan ciri-ciri sektor informal yang dikemukakan dari berbagai pemikir diatas terlihat bahwa posisi sektor informal dalam struktur ekonomi terkesan; a) tidak diakui posisi mereka dan diletakkan dalam struktur tidak jelas, b) mereka sama sekali tidak mendapatkan proteksi dan perlindungan secara hukum, c) usaha ini sering dinilai negatif oleh pemerintah; bahkan d) dianggap sebagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi legal.

Mengenai dikotomi sektor formal dan informal, Mynt dalam Alisjahbana (2005;30-31) bisa ditinjau dari perbedaan karakter sektor tradisional dan modern sebagai berikut ; *Pertama*, unit-unit ekonomi dalam modern sangat terspesialisasi dan terintegrasi penuh. Sebaliknya, unit-unit ekonomi pada sektor tradisional mempunyai derajat spesialisasi rendah, misalnya model produksi subsisten di sektor pertanian maupun sektor informal perkotaan jasa dan perdagangan. *Kedua*, sektor modern mencakup usaha-usaha besar padat modal dengan teknologi modern, sementara

sektor tradisional menampung para petani dan perajin yang bekerja atas dasar teknologi tradisional. *Ketiga*, usaha bisnis di sektor modern mempekerjakan tenaga kerja atas dasar regulasi dan membayar mereka atas dasar produktivitas marginal. Sedangkan sektor tradisional menyerap tenaga kerja dari lingkungan keluarga dan dibayar seadanya atas produktivitas rata-ratanya.

Sementara itu studi yang dilakukan Mustafa (1998) di Surabaya mengenai Pedagang kaki lima, menunjukkan beberapa hal diantaranya; a) sektor informal pedagang kaki lima menunjukkan kemandirian dan otonominya atas keadaan transformasi sosial pada latar belakang masyarakat modern perkotaan, b) sektor informal adalah subyek kreatif dan interpretatif perubahan dalam transformasi sosial. Setiap aktor pelaku perubahan sektor informal mempunyai motif serta kehendak untuk maju dan berkembang sesuai pemaknaan yang secara terus menerus diperbaharui oleh mereka. Jika ditelaah lebih jauh, keseluruhan penjelasan sektor informal diatas bermuara pada teori dualisme Booke. Fenomena dualisme ekonomi merupakan sketsa empiris dari dua wujud keterpisahan sistem formal dan informal yang terus berlanjut lewat proses marjinalisasi pada sistem inferior (Rachbini, 1992;3). Berbeda dengan Booke, Ranis (1984, dalam Alisjahbana 2005;34) memandang dualisme ekonomi sebagai sebuah kontinum karena sektor modern mempunyai hubungan dengan sektor tradisional. Bahkan sektor modern ditegaskan sebagai bentuk kelanjutan dari sektor tradisional.

Seluruh penggambaran sektor informal diatas menunjukkan betapa sektor informal tidaklah bersifat homogen per definisi tertentu bahkan sangat heterogen. Sejumlah ilmuwan sosial mencoba membagi sektor informal menjadi dua sektor (Surbakti, 1997). Pertama, kegiatan ekonomi keluarga berskala kecil dengan pendapatan bervariasi tetapi terjadi sejumlah akumulasi modal sebagai hasil keunggulan kompetitif dan terdapat kelihaihan berdagang dengan sifat perekonomian subsistensi. Sub sektor ini oleh House (1984) menyebutnya sebagai sub sektor intermediate yang merupakan entrepreneur yang dinamis. Kedua, komunitas miskin yang merupakan fenomena kelebihan tenaga kerja (surplus). Kelompok ini menganggap kegiatan sektor

informal sebagai suatu kegiatan yang bersifat temporer karena berharap masih dapat beralih ke sektor formal. Sedangkan kelompok yang pertama justru memperlakukan sektor informal sebagai pekerjaan permanen atau tetap karena dinilai menjanjikan perkembangan ekonomi.

Sektor informal yang menurut para ekonom dikatakan sebagai katup yang cukup ampuh dalam penyerapan tenaga kerja berlebih termasuk di dalamnya tenaga kerja perempuan, pada dasarnya adalah ekonomi kerakyatan yang melibatkan mayoritas rakyat (<http://www.kompas.com/2008/05/16/sector.informal.menjadi.di.penyelamat>). Keberadaan sektor informal ini dipahami sebagai realitas sosial ekonomi masyarakat urban. Ismail (1990) menambahkan bahwa menjamurnya pertumbuhan sektor informal disebabkan karena kesempatan kerja di sektor formal terbatas, adanya kesenjangan antara tenaga kerja yang terampil dan tidak terampil yang menyolok, serta semangat entrepreneurial dan penguasaan teknologi yang tidak memadai. Lebih lanjut dikatakan faktor tersebut membuat peran sektor informal menjadi penting dalam menyerap tenaga kerja perkotaan atau *migran-rural urban* yang tidak terserap oleh sektor formal. Dalam tulisan lain, McGee (1973) mengatakan bahwa gelombang tenaga kerja pedesaan yang memasuki sektor informal bermakna positif. Sektor informal dipahami sebagai *the origin self employment* yang merangsang tumbuhnya kewiraswastaan masyarakat lokal dan akan menggerakkan ekonomi perkotaan. Hal itu terjadi karena sektor informal juga diterima sebagai *counter-part* dan pendukung sebagaimana sumber daya lain bagi pertumbuhan ekonomi perkotaan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Effendi (1997;1) bahwa keberadaan dan keberlangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif tetapi sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja, sektor informal menyediakan peluang-peluang kerja bagi pengangguran dan menjadi gantungan hidup bagi masyarakat miskin.

Salah satu aspek dalam sektor informal yang cukup menonjol perannya dalam menyediakan kesempatan dan peluang-peluang kerja adalah pasar tradisional. Sepanjang

perjalanan sejarah, sektor ini memang terbukti mampu memberikan satu solusi alternatif untuk berperan secara produktif. Pernyataan ini didukung oleh study yang Gertz (1963, dalam Abdullah, 1987) menunjukkan bahwa sejak era 1930-an yang ditandai dengan adanya depresi yang melanda dunia, banyak petani yang kehilangan sumber penghasilan, beralih menjadi pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional yang semula hanya dikuasai oleh segelintir pedagang besar¹⁸. Studi yang berbeda dilakukan Chandler (1985,50) memberikan kesimpulan bahwa pasar tradisional yang bertebaran ditengah masyarakat pedesaan dan perkotaan Indonesia menyediakan lapangan baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Beribu-ribu kaum perempuan mengandalkan kegiatan di pasar tradisional sebagai penopang hidup keluarga atau penambah penghasilan suami¹⁹.

Pentingnya sektor informal pasar tradisional dalam menganggulangi masalah ketenaga-kerjaan juga dinyatakan oleh Abdullah (1987) dengan kegiatan bakul di pasar tradisional pedesaan. Sejalan dengan hal tersebut, Wingiosobroto, ed. (1990) juga melakukan studi dengan subyek penelitian yang sama yakni peran pasar tradisional di pedesaan dan perkotaan menyimpulkan bahwa sifat sektor ini yang lentur dan mempunyai

¹⁸ Tekanan keadaan membuat masyarakat mampu bertahan dalam kehidupan yang serba terbatas dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan seperti yang dituturkan Gertz (dalam penelitiannya tentang kegiatan ekonomi di Mojokuto), adanya depresi dunia yang menyebabkan banyak orang kehilangan sumber pendapatan, ternyata juga merangsang sebagian warga untuk mendirikan industri rumah tangga kecil untuk menganggulangi kelesuan ekonomi. Walaupun secara pendapatan dikatakan mengalami penurunan, namun kegiatan perekonomian semakin meningkat dan mampu bertahan melalui berbagai hambatan hingga masa peperangan usai (Lihat Gertz, dalam Abdullah; 155-156).

¹⁹ Keterlibatan perempuan dalam kegiatan sektor informal pasar tradisional di tiap daerah memang berbeda. Jumlah perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan pasar ini lebih banyak di temukan di daerah-daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta. Bahkan di D.I.Yogyakarta ditemukan data sebanyak 75 sampai 100% dari seluruh pedagang pasar, bisa terdiri dari perempuan. Sedangkan di daerah luar pulau seperti di Sulawesi dan Kalimantan (Tengah dan Timur) jumlahnya lebih sedikit yakni berkisar antara 60-70%. Dari data tersebut menunjukkan akan besarnya peran pasar tradisional dalam memberikan lahan pekerjaan bagi kaum perempuan (Lihat Chandler, 1985;51)

kapabilitas yang besar mampu menciptakan peluang kerja secara langsung maupun tidak langsung, serta memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyerap tenaga kerja khususnya perempuan.

Pasar Tradisional (Sebuah Solusi Penawaran)

Secara umum pasar tradisional tidak bisa dilepaskan keberadaannya dari peran kaum perempuan dengan segala kelebihan dan keluwesannya, sehingga menjadikan usaha berdagang di pasar tradisional menjadi suatu pilihan profesi. Pasar tradisional juga merupakan mata rantai kehidupan. Pedagang, kuli panggul, tukang parkir hingga preman adalah sebuah mata rantai yang tidak terputus. Pasar tradisional juga bukan hanya sekadar tempat untuk bertransaksi, namun juga sebagai rumah besar yang mampu menghidupi banyak orang mulai dari preman-preman pasar hingga bakul-bakul pengais barang-barang pasar yang bisa dimanfaatkan²⁰.

Secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya proses permintaan dan penawaran. Dalam artian sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan transaksi langsung dalam proses tawar-menawar²¹.

²⁰ Relasi pasar yang terakhir disebut adalah termasuk jenis pedagang kecil yang secara *hierarkis* berada pada urutan terendah dalam klasifikasi pedagang pasar tradisional. Secara fungsional keberadaan mereka menguntungkan bagi sebagian pedagang besar karena tenaga kerja mereka bisa difungsikan sewaktu-waktu di saat pedagang besar membutuhkan tenaganya dengan upah yang sangat rendah atau upah pengganti berupa sisa-sisa barang yang disortirnya. Sepintas memang seperti ada eksploitasi dalam hubungan ini, namun dalam perspektif ekonomi substantif, pedagang kecil ini (*bakul eberan*) justru merasa diuntungkan dengan sistem hubungan ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan karena *bakul-bakul eberan* ini melakukan aktivitas perdagangan hanya dengan mengandalkan modal tenaga kerja dan waktu luangnya, sehingga pekerjaan 'memburuh' pada pedagang besar meskipun dengan imbalan yang tidak sebanding adalah sebagai upaya (meminjam istilah Scott) *safety first* atau suatu tindakan penyelamatan awal bagi mereka untuk bisa memperoleh modal barang dagangan yang membuat mereka bisa bertahan dalam kegiatan dagang pasar tradisional dan mampu menyiasati kebutuhan pokoknya dalam kelesuan ekonomi yang menghimpitnya (Lihat Faizah, 2009).

²¹ Ritual tawar-menawar merupakan sifat yang melekat pada pasar tradisional. Itu terjadi karena dalam pasar tradisional tidak ada kebijakan harga dan harga jadi bila terjadi kesepakatan telah terjadi antara kedua pihak, penjual

Sebagaimana dinyatakan Gertz (1963) pasar merupakan mata rantai kehidupan dalam pemenuhan sehari-hari meliputi kegiatan konsumsi masyarakat sekitar. Dalam perspektif ini, oleh Gertz dikategorikan bukan hanya sebagai aliran barang dan jasa, lebih dari itu pasar tradisional juga dikatakan sebagai mekanisme ekonomi yang melibatkan sistem sosial budaya. Distribusi barang dan jasa mencerminkan jenis barang yang simpel dan cepat laku. Aliran distribusi barang-barang pun sangat cepat perputarannya dalam jaringan pasar tradisional walaupun tidak langsung melalui transaksi-transaksi kecil dan sebagian barang yang ditawarkan juga diolah dan dibuat dalam pasar. Dalam hal ini, pasar bukanlah sebagai sarana distribusi yang sederhana melainkan juga sarana produksi walaupun produksinya hanya berlaku pada saat itu juga. Dalam perspektif inilah Nasikun (1984) memandangnya sebagai salah satu faktor tradisional yang mempunyai daya tarik dalam menyerap tenaga kerja perempuan.

Berdasarkan beberapa catatan di atas, dominasi perempuan dalam perdagangan tradisional memang terjadi cukup lama. Indikasi ini diketahui dari hampir setiap pasar tradisional kegiatannya mulai dari aktivitas, partisipasi dan akses perempuan sejak dari penyediaan makan dan minum, menjaga kebersihan lapak, penentu harga, penjaga relasi bahkan sampai pemilik lapak, adalah sebagai pertanda bahwa perempuan menjadi kunci mata rantai perdagangan²². Mengenai keterlibatan

dan pembeli. Sistem harga ini diistilahkan dengan *harga luncur* (istilah Gertz) atau *harga bergeser* (istilah Wingjosoebroto). Adanya sistem harga ini cenderung memunculkan keadaan persaingan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga jadi. Sehingga keluwesan sikap dan keberanian tindakan spekulatif sangat dibutuhkan. Sifat ini oleh Alexander (2003) dilabelkan pada perempuan dan keunikan yang ditemukan dalam pasar ini menjadi daya tarik tersendiri bagi perempuan untuk berperan dalam sektor informal pasar tradisional (Diolah dari berbagai sumber).

²² Dalam catatan sejarah, awalnya pasar tradisional hanya menjual makanan (kebutuhan pokok) penduduk sekitar. Dalam perkembangannya jenis barang yang ditawarkan juga masih berputar pada kebutuhan pokok rumah tangga yang penjualannya dan pembeliannya di dominasi oleh kaum perempuan sehingga peran aktif pasar tradisional tidak bisa terlepas perempuan. Selain itu pasar juga sebagai wahana potensial berkembang biaknya perekonomian rakyat. Karenanya peran pasar tradisional ini tidak bisa digantikan oleh keberadaan

mereka dalam sektor pasar tradisional ini, Dieter-Evers (dalam Abdullah, 2003;199) menyatakan bahwa faktor utamanya adalah rendahnya tuntutan dalam sektor ini dalam artian pasar tradisional tidak terlalu mensyaratkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pelaku pasar umumnya baik berupa ketrampilan, keahlian bahkan modal yang mencukupi. Lebih lanjut Abdullah (2003;203) menguatkan pernyataan tersebut bahwa profesi sebagai pedagang pasar (*bakulan*) tidak memerlukan keahlian yang tinggi, namun dalam dunia pasar tradisional masih diperlukan kiat-kiat tersendiri agar mereka tetap eksis dalam persaingan perdagangan pasar tradisional, yakni kiat-kiat tersendiri untuk bisa merundingkan harga ketika menjual dan membeli, serta kemampuan untuk bisa mempertahankan reputasi sebagai yang mampu membayar sesuai dengan harga yang disepakati (Alexander, 2003;296). Penggambaran ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pedagang di pasar tradisional sebenarnya tidak diperlukan pendidikan tinggi dan keahlian khusus. Sebagai modal utamanya adalah keinginan kuat untuk datang ke pasar dan berupaya mengembangkannya dalam memperoleh penghasilan di pasar.

Hal lain yang menyebabkan banyaknya perempuan yang mengandalkan pasar tradisional dalam memberikan penghasilan seperti diungkap dalam penelitian Wingjosoebroto, ed. (1996;86-92) karena, (1) kebutuhan ekonomis keluarga yang menuntut mereka bisa mencari penghasilan tambahan di pasar yang bisa diandalkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, (2) pasar tradisional memberikan peluang yang kecil dalam resiko suatu usaha, dan (3) faktor psikologis kaum perempuan yang berkaitan dengan bakat dan kemampuan fisik "*keperempuanannya*" menyebabkan mereka lebih menyukai sektor pasar tradisional ini daripada sektor yang lain. Faktor terakhir yang disebut Wingjosoebroto, menguatkan tesis yang disampaikan Abdullah (1987) mengenai kepekaan perempuan sebagai makhluk sosial, dengan bekerjanya mereka di pasar tradisional (sebelumnya mereka adalah petani atau sebagai ibu rumah tangga biasa) telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa sebagai bagian dari anggota masyarakat desa terutama yang

berkaitan dengan biaya sosial, mereka bisa lebih mandiri dibandingkan dengan perempuan-perempuan rumahan lainnya.

Hasil studi lain yang mengindikasikan bahwa faktor kemiskinan yang membelenggu sebagian masyarakat perkotaan dan "tragedi PHK (pemutusan hubungan kerja)" sektor formal memaksa perempuan-perempuan tersebut terlibat dalam sektor informal pasar tradisional. Seperti dikatakan di atas, kefleksibelan pasar tradisional yang tidak mensyaratkan usaha baik dari sisi permodalan, kemampuan bekerja, keahlian maupun akses yang bisa menghubungkan dalam sektor ini, bisa dijadikan sebagai gantungan hidup bagi mereka untuk bisa memperoleh penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan sunbsisten mereka sehari-hari. Dengan modal yang minim atau tidak bermodal sama sekali, mereka bisa meminimalkan resiko usaha dengan 'menggadaikan' tenaga kerja dan waktu mereka. Disamping itu dunia bakulan pasar tradisional selalu identik dengan perempuan karena keluwesan, keprigelan maupun keuletannya untuk bisa memperoleh penghasilan sekalipun dalam keadaan terjepit.²³

Bahasan-bahasan diatas menunjukkan bahwa sektor informal pasar tradisional dengan aktor-aktornya yang oleh sebagian ahli dianggap sebagai patologi sosial yang muncul dalam dunia pembangunan, sebagai pengganggu ketertiban dan kenyamanan, serta pelaku-pelakunya dianggap sebagai pelaku ekonomi bayangan yang rawan terhadap kejahatan, sering melakukan pelanggaran dan mudah dihilangkan kapan saja oleh pembuat kebijakan daerah. Pada kenyataannya sektor ini tetap mampu memberikan celah-celah pekerjaan dan sebagai tumpuan hidup bagi sebagian masyarakat miskin pinggiran.

Adanya kebijakan program pembangunan untuk penataan ketertiban suatu wilayah (sebuah kasus di Surabaya) dengan program '*mallisasi*' yang mengalihkan

warung atau peracangan setempat (Lihat Chandler, 1985;57).

²³ Sejalan dengan pernyataan diatas, diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan Faizah (2009) memberikan kesimpulan bahwa sektor ini mempunyai fungsi sebagai selain sebagai sistem ekonomi juga mempunyai sistem sosial, yang mempunyai sifat penyebaran pasar yang loggar dalam pendistribusian barang. Disinyalir, sifat ini menjadi lebih terbuka bagi siapa saja (termasuk perempuan *bakul-bakul* tua) sekalipun bagi mereka yang tidak mempunyai modal secara finansial, mereka bisa ikut berperan secara produktif di sektor ini.

beberapa pasar tradisional menjadi pusat perbelanjaan rakyat berbasis modern, memunculkan suatu keprihatinan dalam dunia sosial-ekonomi masyarakat. Seperti diutarakan dalam tulisan sebelumnya, suatu kebijakan program pembangunan yang kurang memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin, dikhawatirkan akan terperosok pada kekeliruan serupa. Dengan berdirinya *hypermarket-hypermarket* (meskipun berbasis tradisional dalam artian pelaku-pelakunya sebagian adalah pelaku-pelaku lama pasar tradisional), yang menggeser keberadaan pasar tradisional yang benar-benar tradisional, bisa diprediksikan akan merubah keseimbangan sistem sosial ekonomi yang ada. Ironisnya lagi, paket-paket kebijakan pembangunan tersebut berdampak pada buruknya sistem sosial ekonomi khususnya di bidang ketenagakerjaan. Sehingga tidak heran bila semakin bertambah jumlah pengangguran termasuk perempuan-perempuan bakul pasar tradisional yang sebagian besar tidak memiliki modal cukup untuk mengembangkan usaha dan tidak memiliki relasi-relasi lainnya yang berada di luar pasar. Seperti pada saat relokasi pasar tradisional Wonokromo, Surabaya (kini menjadi Royal Plaza), berdasarkan data APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) mencatat, sekitar 400 pemilik lapak tutup usaha setiap tahun terkena dampak persaingan dan sebanyak 83 pasar tradisional di Surabaya yang omzetnya terus menurun (*OASE-LMI*, 2 Desember 2008).

Di sisi lain, kecenderungan meningkatnya keberadaan pasar modern ini, ditinjau dari penyerapan tenaga kerja perempuan, berdampak pada tidak banyak tenaga kerja perempuan yang diberdayakan dalam sektor ini. Karena hanya mereka yang mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan berketrampilan yang terlatih khusus yang punya peluang berpartisipasi dalam pasar modern. Hal ini berarti keberadaan pasar modern makin rentan menggusur eksistensi pasar tradisional sebagai salah satu institusi ekonomi rakyat yang selama ini terbukti banyak diandalkan.

Terakhir, sebagai suatu kajian ulang, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menelaah kembali mengenai kebijakan program pembangunan 'modernisasi pasar tradisional' untuk lebih berpihak kepada rakyat kecil dengan tidak perlu menghambat program

pembangunannya. Namun harus ada pemikiran akan kelangsungan hidup pedagang-pedagang kecil pasar tradisional dengan ratusan jiwa yang tertanggung. Upaya tersebut mungkin bisa dilakukan dengan memberdayakan secara aktif pelaku-pelaku pasar tradisional ini dengan memberikan akses kepada mereka mengenai informasi kerja, permodalan dan hubungan dalam masalah distribusi barang. Untuk kesekian kalinya, program pembangunan yang dicanangkan mungkin bisa lebih peduli terhadap permasalahan perempuan. Oleh karena permasalahannya bukan hanya terletak pada tujuan kegiatan yang bisa menjawab 'kebutuhan praktis' atau mengubah kondisi kaum perempuan yakni memperjuangkan posisi dan jumlah keterlibatan perempuan di bidang ketenagakerjaan.

PENUTUP

Fenomena semakin menyempitnya peluang kerja dan semakin banyaknya kelebihan tenaga kerja, agaknya menjadi permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Berbagai kebijakan program pembangunan *meritokratis dan a-historis* berakibat pada keuntungan sekelompok minoritas masyarakat. Diharapkan paket kebijakan selanjutnya tidak akan menjerumuskan pembuat kebijakan pada kekeliruan serupa sehingga penyelamatan dan pemberdayaan tenaga kerja bisa teratasi.

Kondisi perekonomian yang terpuruk bagi sebagian masyarakat, menyebabkan bagian dari anggota keluarga yang lain termasuk anak-anak perempuan dan ibu rumah tangga beralih peran dari wilayah domestik ke wilayah produktif. Terbatasnya kemampuan dan akses serta permodalan menyebabkan mereka menjatuhkan pilihan untuk menambah penghasilan keluarga pada sektor informal pasar tradisional.

Di sektor inilah mereka bisa berperan aktif dalam kegiatan perekonomian rumah tangga yang bersifat subsisten. Ke depan diharapkan peran aktif mereka bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga kegiatan produktif mereka tidak rawan terhadap segala kebijakan dan bisa semakin meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga kondisi ini bisa lebih kondusif lagi dalam mengurangi angka pengangguran perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (1987), *Wanita Bakul di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta, Yogyakarta; Gadjah Mada (Pusat Penelitian Kependudukan).
- Abdullah, T (Ed), (1987), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta; LP3ES.
- Alexander, J. (2003), *Wanita Pengusaha di Pasar-Pasar Jawa, Etnisitas, Gender, dan Semangat Kewirausahaan*. Jakarta; LP3ES.
- Alisjahbana. (2005), *Perlawanan Pedagang kaki Lima Kota Surabaya dalam Menghadapi kebijakan Pemerintah Kota (Suatu Studi tentang Strategi Pedagang Kaki Lima dalam Mempertahankan Hidup)*. Disertasi (tidak dipublikasikan). Surabaya; Universitas Airlangga hal.30-31,34.
- Asyiek, F. (1994), *Wanita Aktivitas Ekonomi dan Domestik*. Yogyakarta; Jurnal PSW
- Boediono. (1983), *Kelesuan Ekonomi dan Sektor Industri*. Jakarta; LP3ES.
- Chandler, G. (1985), *Wanita Pedagang di Pasar Desa Jawa*. Jakarta; LP3ES.
- Chris M dan Peter V. D. (2000). *Indonesia di Tengah Transisi*. Yogyakarta; LKIS.
- Dieter-Evers. (1991), *Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta; LP3ES.
- Effendi, T.N. (1997), *Sektor Informal dan Wawasan Pengembangan Masyarakat*. Makalah Lokakarya Pembinaan Sektor Informal, (tidak dipublikasikan). Jakarta; Kantor Lingkungan Hidup.
- Faizah,Siti I. (2009). *Perempuan Bakul dan Pasar Tradisional (Studi Deskriptif Kualitatif Strategi Adaptasi Perempuan Bakul di Pasar Keputran Surabaya*. Tesis (dalam proses publikasi). Surabaya; Universitas Airlangga hal.119-132.
- Firdausy, C.M. (1995), *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan Jakarta*. Jakarta; Dewan Riset Nasional- Bappenas dan Puslitbang Ekonomi LIPI.
- House, W. J. (1984), *Nairobi's Informal Sector; Dynamic Entrepreneurs or Surplus Labor*. University of Chicago, page; 279-298.
- Khudori, (Ed). (2005), *Pertanian Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional; Argumentasi Teoritis, Faktual dan Strategi Kebijakan*. Yogyakarta; Lapera Pustaka Utama.
- Kian-We, The. (1997), *Faktor-Faktor Pokok dalam Pendapatan di Indonesia*. Jakarta; LP3ES.
- Kusutjiarti, S. (2003), *Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi; Dinamika Hubungan Gender dan Masyarakat Jawa*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Gee, Mc. (1973). *The Urbanization Process in The Third World; Explorations in Search of a Theory*. London; G.Bell and Soon.
- Mubyarto, (Ed). (1984). *Nelayan dan Kemiskinan,; Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta; Rajawali Press.
- Mustafa, A. (1998), *Transformasi Sosial di Sektor Informal Perkotaan; (Studi tentang Perubahan pada Peran Interaksi dan Jaringan Sosial Pedagang Kaki Lima di Surabaya*. Disertasi (publikasi). Surabaya; Universitas Airlangga.
- Mosse, J, C. (1993). *Half The World, Half a Chance; an Introduction to Gender and Development*. Oxford; Oxfam UK.
- Nanga .(2000). *Makro Ekonomi Teori; Masalah dan Kebijakan*. Jakarta; Rajawali Press.

- Nasikun. (1994). *Urbanisasi Berlebih, Involusi Perkotaan dan Radikalisme Politik di Negara-Negara Berkembang*. Jakarta; LP3ES.
- Oey, M. (1985). *Perubahan Pola Kerja Kaum Wanita di Indonesia selama Dasawarsa 1970, Sebab dan Akibatnya*. Jakarta; LP3ES hal.8;17;27.
- Pia, A. (1985). *Mubazir bila Potensi Wanita tak Dimanfaatkan*. Jakarta; LP3ES.
- Rachbini, D. J. (1992). *Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal*. Jakarta; LP3ES.
- Rahma, S. (1996). *Proses Marginalisasi Tenaga Kerja Wanita*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Sandy, R. (1981). *Female Power and Male Dominance*, Cambridge; Cambridge University Press.
- Sajogjo. (1977), *Golongan Miskin dan Partisipasi Pembangunan Desa*. Jakarta; LP3ES.
- Sethuraman. (1981). *The Urban Informal Sektor in Developing Countries; Employment, Poverty and Environment*. Geneva; International Labour Office (ILO).
- Scott, J. (1968), *The Moral Economy of The Peasant; Rebellion and Subsistence in South Asia*. New Haren; Yale University.
- Sugiharti, R. (1996). *Proses Marginalisasi Wanita*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Suhatmini, H. (1994), *Produksi dan Reproduksi; Studi Kasus Pekerja Wanita pada Industri Rumah Tangga di Yogyakarta*. Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada.
- Surbakti, R. (1997). *Sektor Ekonomi Informal Menghindar dari Realitas*. Makalah (tidak dipublikasikan). Surabaya; Universitas Airlangga.
- Hendarso, E. S. (2000), *Studi Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Penanggulangan Pengangguran dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin di Mojokerto*. Penelitian (tidak dipublikasikan). Surabaya; LPPM Unair.
- Susanti, E. (2005), *Berperan tapi Dipinggirkan; Wajah Perempuan dalam Ekonomi*. Jakarta; Konsorsium Swara Perempuan (KSP) dan Ford Foundation.
- Sutinah. (1996), *Diskriminasi Upah Pekerja Wanita*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Suyanto, (Ed). (2008), *Dampak Krisis Pangan dan Kenaikan Harga BBM terhadap Kelangsungan Hidup Keluarga Miskin di Surabaya*. Surabaya; Airlangga University Press.
- Soedarso, ed. (2006), *Masalah Pengangguran di Jawa Timur*. Surabaya; Badan Perencanaan Prop. Jatim dan LPPKM Universitas Airlangga.
- Tjiptoherijanto, P. (1997). *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta; Universitas Indonesia Press.
- White, R, D and Pauline, W. (1990). *The Women of Rural Asia*. Boulder-Colorado; Westview Press.
- Widiarni. (2005). "Mengurai Kemiskinan, Di mana Perempuan?". *Jurnal Perempuan*, Edisi 42. Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan.
- Wingjosoebroto,ed. (1996), *Wanita dan Pasar Tradisional*. Surabaya; Pussekkom Paramawidya.
- Wiludjeng, H,ed. (2005). *Dampak Pembakuan Gender (Terhadap Perempuan Kelas Bawah di Jakarta)*. Jakarta; LBH APIK.
- Yustika, A, E. (2003). *Negara Versus Kaum Miskin*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.